

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN LAHAN TIDUR
UNTUK Mendukung Peningkatan KETAHANAN PANGAN**

Oleh :

TOTOK SULISTYONO.,S.H.,M.M
KOLONEL INF NRP 1910037061268

KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Besar dan atas segala rahmat, ridho dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul yang disetujui : “Optimalisasi Pemberdayaan Lahan Tidur Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan”.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tanggal April 2021 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXII. Proposal judul Taskap dipaparkan dihadapan tim penguji selanjutnya Lemhannas RI menentukan judul Taskap yang harus ditulis oleh peserta.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada Yth bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan terimakasih kepada yang saya hormati dan apresiasi Tutor Pembimbing Taskap bapak Ir. Edi Permadi dan juga disampaikan trimaksih kepada Tim Penguji, tak lupa pula terimakasih kepada istri dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan semangat, demikian juga seluruh Staf Lembaga serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai selesai sesuai dengan waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon kiranya dapat memberikan koreksi dan masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan saran kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa memberikan hidayah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terimakasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta 23 Juli 2021

Penulis



Totok Sulistyono, S.H.,M.M

Kolonel Inf Nrp 1910037061268



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Totok Sulistyono, S.H., M.M

Pangkat : Kolonel Inf

Jabatan : Kabidrendik

Instansi : Seskoad

Alamat : Jalan Gatot Subroto no, 69 Bandung.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Sulistyono

Totok Sulistyono, S.H.,M.M
Kolonel Inf Nrp 1910037061268

LEMBAR PENGESAHAN TASKAP HASIL REVISI/ PERBAIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER LXII TAHUN 2021

Nama : Kolonel Inf Totok Sulistyono, S.H., M.M

Judul Taskap: **OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN LAHAN TIDUR**
UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Taskap tersebut diatas telah direvisi/ diperbaiki sesuai masukan dari penguji Taskap, materi yang telah disempurnakan meliputi :

1. Bab I. Pendahuluan
 - a. Pertanyaan Kajian di pasal 2 harus searah dengan subansi kajian di Bab III.
 - b. Telah ditambahkan pengertian Optimalisasi dan pemberdayaan.
2. Bab II. Tinjauan Pustaka
 - a. Pasal Paradigma Nasional sudah dihilangkan sesuai Juknis terakhir.
 - b. Pasal Perkembangan Lingkungan Strategis ditambahkan
 - 1) Lingkungan Global
 - 2) Lingkungan Regional
 - 3) Lingkungan Nasional (Geografi, Demografi, SKA, Ideologi, Politik, Sosbud, Hankam, Peluang dan Kendala)

Tutor Taskap

Jakarta 20 Agustus 2021
Ketua Tim Penguji Taskap

Ir. Edi Permadi
Tenaga Ahli Profesional Bid. SKA

Marsda TNI I Nyoman Trisantoso, S.I.P., M.Tr.(Han)
Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ilpengtek

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari

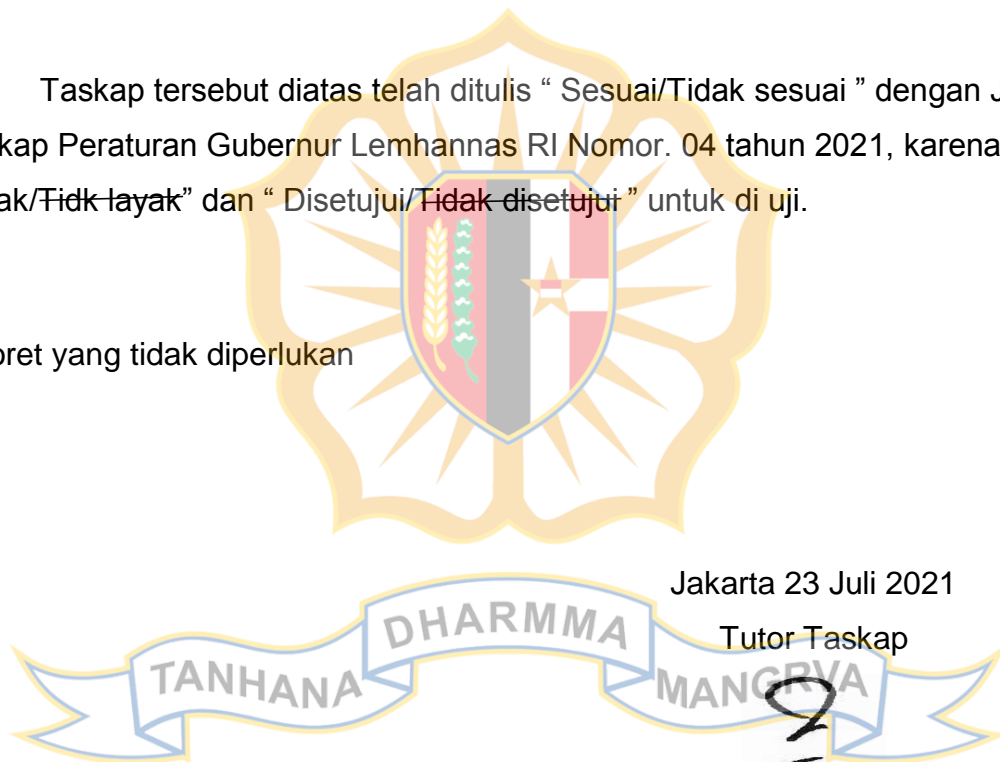
Nama : Kolonel Inf Totok Sulistyono, S.H.,M.M

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII.

Judul Taskap : **OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN LAHAN TIDUR
UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN**

. Taskap tersebut diatas telah ditulis “ Sesuai/Tidak sesuai ” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor. 04 tahun 2021, karena itu “ Layak/Tidak layak” dan “ Disetujui/Tidak disetujui ” untuk di uji.

* Coret yang tidak diperlukan



Jakarta 23 Juli 2021

Tutor Taskap

Ir. Edi Permadi

Tenaga Ahli Profesional SKA

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Pendekatan dan Metode	8
6. Pengertian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	13
8. Peraturan Perundang-undangan Terkait	14
9. Landasan Teoritis	16
10. Data dan Fakta	20
11. Lingkungan Strategis	23

BAB III	PEMBAHASAN	
	12. Umum	27
	13. Kendala Yang Dihadapi Pada Pemberdayaan Lahan Tidur Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan..	28
	14. Sarana dan prasarana Pertanian dalam Optimalisasi Pemberdayaan Lahan Tidur	37
	15. Bagaimana Optimaslisasi Pemberdayaan Lahan Tidur dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan	42

BAB IV	PENUTUP	
	16. Umum	48
	17. Simpulan	48
	18. Rekomendasi	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR GAMBAR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

1. Tabel Analisa SWOT
2. Tabel Sensus Penduduk tahun 2020
3. Tabel Perkiraan dan ketersediaan kebutuhan Pangan Pokok Nasional.
4. Tabel Luas dan Penyebaran Lahan Kritis menurut Provinsi.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Salah satu kebutuhan dasar dan pokok bagi manusia yang tidak dapat disubsitusikan dengan bahan lain dan tidak dapat ditunda juga adalah pangan, sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi manusia. Komponen dasar yang diwujudkan pada sumber daya manusia yang berkualitas serta sebagai pilar untuk pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik suatu negara salah satunya adalah pangan, negara dan masyarakatnya harus secara bersama-sama memenuhi kebutuhan pangan tersebut.

Penduduk Indonesia sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian maka Indonesia merupakan negara agraris. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia masih dominan bekerja di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 25,19% pada tahun 2019 atau 31,87 juta orang dari total angkatan kerja 133,56 juta orang.

Kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sangat menguntungkan dan mendukung negara ini, hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah, serta beriklim tropis dimana sinar matahari memancar sepanjang tahun sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Sumber kekayaan alam ini sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara yang makmur, seperti tercukupi kebutuhan pangan seluruh warganya. Sektor pertanian diharapkan menjadi salah satu sektor penunjang yang memiliki andil yang sangat besar dalam membantu menghasilkan devisa negara secara berkelanjutan.

Pemberdayaan lahan tidur merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menggarap lahan yang belum dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Lahan tersebut belum dipergunakan

oleh pemiliknya dan tidak terawat namun status kepemilikannya belum jelas dan tercatat secara resmi di pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan para petani untuk memberdayakan lahan tidur tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat secara umum karena tidak merusak lingkungan. Untuk mendukung kelangsungan kegiatan yang ada diperlukan sistem pertanian yang selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat sekitar sehingga tidak terjadi konflik yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan.

Ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang dan perebutan lahan yang terus meningkat baik untuk keperluan produksi pertanian maupun untuk keperluan lainnya memerlukan pemikiran yang seksama dalam mengambil keputusan. Dari sumber daya lahan dimanfaatkan yang paling menguntungkan secara terbatas, dan sementara itu juga melakukan tindakan untuk penggunaan masa mendatang. Agar mampu menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang maka lahan perlu diarahkan serta dikelola untuk dimanfaatkan bagi kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya.

Tantangan ke depan tidak terbatas pada upaya peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Kebutuhan lahan yang semakin bertambah untuk pertanian, pertambangan dan industri disebabkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan perumahan dan fasilitas umum yang bertambah dengan pesat membuat pemilik lahan untuk berpikir praktis dengan investasi lahan pertanian menjadi properti.

Dalam (Simatupang,2007) menyatakan bahwa “ Ketahanan Pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu negara.” Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting karena sektor ini menjadi penyedia pangan utama (Sumastuti, 2010), lebih-lebih negara yang sedang membangun, karena memiliki dua peran yaitu sebagai salah satu alat ukur utama pembangunan ekonomi dan salah satu target utama pembangunan.

Ketahanan pangan difungsikan sebagai prasyarat untuk terjaminnya distribusi pangan determinan utama dari inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan tenaga kerja produktif serta fungsi ketahanan pangan sebagai salah satu determinan lingkungan perekonomian yang stabil dan kondusif bagi pembangunan. Semua negara memiliki strategi tersendiri dalam membangun sistem ketahanan pangan yang mantap. Program pematapan ketahanan pangan nasional dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan Indonesia merupakan hal sangat rasional dan wajar.

Dalam rangka mempertahankan stabilitas pangan dan menjaga ketahanan pangan, Indonesia perlu belajar dengan Selandia Baru. Perhatian besar pemerintah Selandia Baru terhadap sistem pertanian terutama untuk komoditas lokal merupakan salah satu terobosan keberhasilan ketahanan pangan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dan memodifikasi dalam hal ini sistem tersebut dengan memberikan fasilitas bagi petani untuk mengembangkan hasil produksi pangan serta memanfaatkan dana desa melalui program padat karya, juga sosialisasi secara masif gerakan beli hasil pangan petani lokal.

Masyarakat Indonesia dapat mendukung peningkatan ketahanan pangan dengan usaha mengembangkan produktivitas tanaman pertanian. Maka perlu adanya upaya melakukan cara Intensifikasi maupun ekstensifikasi. Lahan yang dibiarkan lama tidak dikelola dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekstensifikasi dengan optimal, maka tidak harus membuka lahan baru. Lahan tidur di catat sebagai bagian dari proses perkembangan kota yang mempunyai sifat dinamis, akan tetapi ketidurannya tidak memberikan sumbangan positif bagi pembentukan lingkungan sekeliling (Trancik, 2001). Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat diperlukan tambahan produktivitas tanaman pertanian yang lebih banyak namun dihadapkan dengan ketersediaan lahan pertanian yang terbatas maka perlunya optimalisasi pemberdayaan lahan tidur untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan.

2. Rumusan masalah.

Kebutuhan pangan masyarakat Indonesia telah dapat dipenuhi oleh ketersediaan beras dari produksi dalam negeri, selama tahun 2019, telah dapat memenuhi Produksi Gabah Kering Giling (GKG), berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik mencatat sebesar 54,60 juta ton, dengan ketersediaan bersih dalam bentuk beras diperkirakan sebesar 32,41 juta ton. Dalam hitungan sementara kebutuhan konsumsi total sebesar 29,78 juta ton, maka menurut penaksiran terdapat surplus pada akhir tahun 2019 sebesar 2,6 juta ton.

Saat ini produksi beras domestik di 21 provinsi belum merata termasuk Jawa barat dan Sumatera Utara walaupun kebutuhan beras nasional masih dapat di penuhi dari produksi dalam negeri, maka untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah yang minus disuplai beras dari provinsi lain yang produksinya surplus. Tujuh provinsi dengan produksi beras paling tinggi sepanjang 2019 dari yang terbesar yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Aceh.

Presiden menyatakan pembatasan kegiatan berpengaruh terhadap lalu lintas barang dan komoditas antar negara akibat pandemi Covid-19 telah berdampak pada persediaan pangan, terutama pada komoditas yang masih banyak impor. Hal ini seperti disebutkan dalam laporan Food and Agriculture Organization (FAO). Oleh karena itu, Presiden memperingatkan para menteri agar fokus mencari jalan keluar untuk komoditas yang dapat tumbuh baik di Indonesia, seperti kedelai, jagung, gula dan bawang putih.

Saat ini semakin merebaknya wabah pandemi Covid-19 membuat pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan (*physical distancing*) seperti PSBB dan PPKM. Kelancaran rantai pasok pangan ini sangat dipengaruhi oleh wabah Covid-19, Walaupun PSBB/PPKM mengecualikan sektor pangan, tapi berjalannya sektor ini juga perlu didukung industri lain seperti transportasi dan pengemasan yang terkena dampaknya, Menteri Pertanian RI menyatakan bahwa Covid-19 telah

meluluhlantakkan semua sektor kehidupan. Mewabahnya pandemi Covid-19 memaksa pemerintah melakukan pembatasan baik PSBB maupun PPKM sehingga segala aktivitas masyarakat sangat dibatasi termasuk sektor ekonomi dan pertanian mulai dari hulu sampai hilir terdampak. Problematika aktivitas perekonomian di semua lini usaha, termasuk sektor pertanian dan ketersediaan pangan nasional disebabkan oleh Pandemi Covid-19 perlu diantisipasi dengan cermat.

Sebagai pelaksana terdepan dan motor penggerak pertanian tim penyuluh dan masyarakat petani harus mendapat dukungan dari semua pihak dalam rangka melakukan percepatan tanam dalam rangka Gerakan Ketahanan Pangan (GKP) yang diperkenalkan Kementerian Pertanian pada situasi ancaman virus corona saat ini.

Kementerian Pertanian melalui Direktur Perlindungan dan Perluasan Lahan (PPL) menyatakan bahwa, Indonesia memiliki potensi raksasa lahan tidur seluas 33,4 juta hektare yang terdiri dari lahan pasang surut 20,1 juta hektare dan rawa lebak 13,3 juta hektare. Lahan tidur bisa dikelola menjadi lahan produktif dengan bantuan sarana dan prasarana. Dari jumlah tersebut, seluas 9,3 juta hektare diperkirakan sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pertanian, dalam pengembangan lahan rawa diimplementasikan melalui optimasi lahan rawa (lebak atau pasang surut) yang telah dimulai sejak 2016 seluas 3.999 hektare, kemudian 2017 seluas 3.529 hektare, dan pada 2018 seluas 16.400 hektare, pada 2019 direncanakan akan mengembangkan lahan rawa seluas 500 ribu hektare yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

Permasalahan utama di masyarakat yang menjadi mitra kegiatan pemberdayaan adalah tidak termanfaatkannya potensi dan sumber daya lokal dari sisi keterampilan wirausaha, maupun dana untuk membangun kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Sudah lama warga tidak melakukan orientasi kegiatan produktif, bahkan bisa terjadi perselisihan dalam hubungan bertetangga atas pemanfaatan lahan tak produktif di wilayah sekitar. Dengan peningkatan melalui wirausaha bagi masyarakat domestik yang diusulkan adalah

pemanfaatan lahan kurang produktif sebagai mitra untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian keluarga.

Mencermati latar belakang tersebut, dengan meningkatnya kebutuhan pangan dihadapkan dengan ketersediaan lahan tidur yang tidak produktif maka pertanyaan kajian yang harus dicarikan upaya pemecahannya secara komprehensif integralistik adalah : **KENDALA YANG DIHADAPI PADA PEMEBERDAYAAN LAHAN TIDUR ?, SARANA DAN PRASARANA DALAM OPTIMALISASI LAHAN TIDUR? DAN BAGAIMANA OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN LAHAN TIDUR UNTUK Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan ?**

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.

Penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran dan menganalisis tentang optimalisasi pemberdayaan lahan tidur untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan.

b. Tujuan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai optimalisasi pemberdayaan Lahan tidur untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup bahasan ini dibatasi pada masalah optimalisasi pemberdayaan lahan tidur dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.

b. Sistematika.

Untuk memudahkan pemahaman, maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) Bab I. Pendahuluan.

Menguraikan secara singkat tentang latar belakang masalah penulisan, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan penulisan serta pengertian-pengertian yang digunakan.

2) Bab II. Tinjauan Pustaka.

Berisi uraian umum tentang tinjauan pustaka mengenai pentingnya optimalisasi pemberdayaan lahan tidur yang dapat mendukung peningkatan ketahanan pangan.

Dalam analisis ini, beberapa landasan pemikiran akan terkait dengan analisis paradigma nasional. Pancasila sebagai landasan Idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan nusantara sebagai landasan visional dan ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bab ini juga akan menguraikan beberapa latar belakang teori yang mendukung oleh beberapa tinjauan kepustakaan yang menjadi pijakan awal pembahasan pada bab berikutnya.

3) Bab III. Pembahasan.

Menjelaskan apa yang menjadi kendala dalam optimalisasi pemberdayaan lahan tidur dalam rangka peningkatan ketahanan pangan,

Menjelaskan tentang sarana dan prasarana apa saja dalam optimalisasi pemberdayaan lahan tidur yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan

Menyajikan konsep pemecahan masalah secara sistematis mengenai optimalisasi pemberdayaan lahan tidur yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.

4) BAB IV. Penutup.

Menyajikan simpulan yang akan menjawab judul Taskap serta mengajukan saran-saran untuk memecahkan pokok permasalahan optimalisasi pemberdayaan lahan tidur guna mendukung peningkatan ketahanan pangan.

5. Pendekatan dan Metode

a. Pendekatan

Penulisan naskah ini disusun dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan adalah sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, Tesis dan Disertasi, peraturan-peraturan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronika.

Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono:2006)

Sedangkan menurut ahli yang lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono:2012)

b. Metode

Dalam pembahasan dan penulisan Taskap ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penulisan deskriptif analisis, yaitu dengan penelusuran kepustakaan dan mengumpulkan informasi yang faktual dan aktual, selanjutnya dilakukan analisis sehingga akan didapatkan hasil analisa adapun pengertian dari metode

deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹

Pemilihan metode deskriptif ini dikarenakan penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang.²

Penelitian deskriptif tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau eksplorasi dan klasifikasi secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

6. Pengertian.

Agar diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama, perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian dari istilah kata atau penggalan kalimat yang terkait dengan pokok bahasan, adalah sebagai berikut :

- a. Lahan Tidur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti lahan tidur adalah tanah terbuka yang tidak digunakan oleh pemiliknya secara ekonomis. Menurut Rita Hanafie dalam buku “ Pengantar Ekonomi Pertanian” penerbit CV. Andy, halaman 56, tahun 2010. Lahan Tidur adalah lahan yang biasanya digunakan untuk usaha tani tetapi tidak dimanfaatkan lebih dari 2 tahun.

¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta 2009), Hlm. 23

² Mohamad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011). hlm 52

- b. Degradasi Lahan. Sektor pertanian mendefinisikan degradasi lahan sebagai proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap, dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia dan biologi (Shresta, 1995; Singer, 2006; Sitorus, 2011).
- c. Intensifikasi Pertanian. Intensifikasi pertanian merupakan pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana dengan tujuan meningkatkan hasil atau produk-produk pertanian. Cara yang dilakukan dengan Panca usaha tani 1. Pengolahan tanah, 2. Irigasi yang teratur, 3. Bibit Unggul, 4. Pemupukan, 5. Pemberantasan Hama dan Penyakit. yang telah ditambahkan 6. Pasca panen dan 7. Pemasaran menjadi sapta usaha tani.
- d. Ekstensifikasi Pertanian. Adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru atau daerah yang sebelumnya belum pernah dimanfaatkan manusia, misalnya membuka hutan, semak belukar dan daerah sekitar rawa-rawa. Prinsipnya adalah nilai tambah dari lahan yang belum dimanfaatkan.
- e. *Physical distancing*. Menurut WHO *Physical distancing* adalah melakukan pembatasan jarak secara fisik antar manusia, bukan berarti memutuskan hubungan kerabat atau hubungan sosial.
- f. Diversifikasi pertanian.
- 1) Menurut Wikipedia diversifikasi pertanian artinya pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan secara ekonomi maupun lingkungan. Sumber daya pertanian bisa berupa lahan pertanian, bangunan (kandang, lumbung,

rumah tanaman, dan sebagainya) mesin pertanian hingga input pertanian yang lain seperti pupuk.

- 2) Menurut Media Tani. Definisi diversifikasi pertanian adalah usaha untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian melalui penganeka ragam jenis usaha atau tanaman pertanian lainnya. Ada pula yang mengartikan bahwa diversifikasi merupakan pengelolaan dalam sumberdaya pertanian untuk dialihkan atau ditambahkan pada kegiatan yang lain yang memiliki nilai ekonomi.
- g. Ketahanan Pangan; kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. (Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan)
 - h. Analisis SWOT. Berdasarkan Freddy (2013) analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan Peluang (*Opportunity*) namun secara bersama dapat meminimalkan Kelemahan (*Weakness*) dan Ancaman (*Threats*).
 - i. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 26 tahun 2008, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Perencanaan tata ruang Nasional merupakan kebijakan jangka panjang waktu 20 tahun dan dilakukan paninjauan ulang setiap 5 tahun sekali.
 - j. Pemberdayaan.
 - 1) Menurut Prijono dan Pranaka, pemberdayaan mengandung dua arti pengertian yang pertama adalah *to give power of authority*, pengertian kedua *to give of ability to or anable*. Pemaknaan pengertian yang

pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu (Suryana, 2010).

- 2) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 7 tahun 2007 pasal 1 ayat 8 tentang Kader Pemberdayaan masyarakat, menyatakan pemberdayaan adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

k. Optimalisasi.

- 1) Andri Rizki Pratama (2013: 6) mendefinisikan Optimalisasi sebagai upaya individu untuk meningkatkan kegiatan untuk bisa meminimalisir kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar mencapai tujuan dengan baik dalam tenggat waktu tertentu.
- 2) S., Rao, John Wiley dan Sons (2009). Menyebutkan bahwa optimalisasi merupakan suatu hasil yang di capai sesuai keinginan, sehingga optimalisasi adalah pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Lahan yang tidak dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya menjadi areal lahan yang tidur tidak terurus adalah sebagian dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Persoalan yang sering timbul dalam rangka mengembangkan produksi pertanian adalah terjadinya konversi lahan yang semakin cepat setiap tahunnya. Sebagai contohnya, adanya konversi lahan pertanian menjadi industri, pemukiman, jalan, fasilitas publik dan lain lain. Lahan tidur merupakan lahan produktif dan tidak produktif yang belum dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian produktif.

Sebagai contoh, kawasan hutan/konservasi yang pernah dibuka, untuk pertanian ataupun hanya diambil kayunya dalam jumlah besar lalu tidak dimanfaatkan lagi. Rumput dan semak belukar akan tumbuh memenuhi areal tersebut yang tidak terawat yang non produktif. Masyarakat petani dapat memanfaatkan lagi lahan tidur bekas pertanian apabila para petani memahami cara untuk mengolah lahan tersebut, dengan adanya bantuan penyuluhan dari pemerintah hal tersebut sangat dimungkinkan untuk tercapai.

Sektor pertanian merupakan sektor penting bagi bangsa Indonesia, karena sebagian besar mata pencaharian penduduk (70 persen penduduk Indonesia) bergantung pada sektor ini. Namun sektor pertanian dalam arti luas belum menunjukkan pertumbuhan yang optimal menurut potensinya.

Pengembangan sistem usaha pertanian rantai terpadu ke depan perlu mendapat perhatian khusus dengan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif yaitu pembangunan pertanian dari awal sampai akhir. Pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan sektor produktif dan kecukupan pangan, tetapi juga keragaman atau diversifikasi pangan.

Adanya diversifikasi pertanian pusat dan daerah dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan lahan yang tersedia dan menggali sumber pangan yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing sehingga dapat ditingkatkan produk unggulan daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan yang pada akhirnya akan menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan terkait serta latar belakang teoritis dan studi literatur perlu dijelaskan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bangsa dan negara agar cita-cita dan tujuan kebangsaannya dapat terwujud. Indonesia sering disebut sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani, namun masalah ketahanan pangan masih menjadi situasi yang tidak dapat kita hindari.

Dalam lingkup yang sederhana maupun moderen pemberdayaan lahan tidur untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah sebuah keniscayaan, baik pemenuhan kebutuhan keluarga bahkan pada cakupan yang lebih besar yaitu bisnis produksi pertanian bagi swasta maupun pemerintah Indonesia.

8. **Peraturan Perundang-undangan yang terkait.**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dicermati sesuai dengan judul tugas ini adalah tentang pemberdayaan lahan tidur dan ketahanan pangan, otonomi daerah, dan pengelolaan sumber daya alam.

a. **Undang-undang RI nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025.**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Dalam bentuk Visi, Misi dan arah pembangunan Nasional selama masa 20 tahun ke depan dari tahun 2005-2025.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan nasional dan penunjang tatanan kehidupan. Sumber daya alam yang berkelanjutan akan menjamin ketersediaan sumber daya pangan yang berkelanjutan untuk pembangunan. Dalam mewujudkan Indonesia yang progresif, mandiri dan berkeadilan, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin ketahanan nasional.

b. **UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).**

Sebagai mata pencaharian, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagian masyarakat Indonesia adalah bertani maka stigma negara Indonesia sebagai negara agraris bahwa Indonesia sebagai negara agraris terus melekat. Dengan adanya Undang-undang tersebut dapat memberikan jaminan dan mendorong pemerintah untuk mengembangkan pertanian sedangkan bagi petani menjadi motivasi dan meningkatkan gairah dalam mengelola pertanian secara berkelanjutan.

c. **Undang-undang RI nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.**

Undang-undang ini terdiri dari 65 pasal dalam 14 bab, dan yang mengatur ketahanan pangan adalah pasal 45-50 pada Bab VII. Dalam Pasal 45: Pemerintah bertanggung jawab bersama masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah mengatur, mengontrol, mengendalikan, dan mengawasi ketersediaan pangan secara kuantitas dan kualitas yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau bagi daya beli masyarakat. Kecukupan kebutuhan hidup masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pembangunan pertanian tetap berjalan.

d. **Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.**

Pemerintah Pusat mempunyai tugas utama membuat regulasi Nasional dalam masalah pertanian dan ketahanan pangan, alokasi anggaran dan fasilitas. Sedangkan pemerintah daerah menerapkan kebijakan nasional dalam menetapkan prioritas pembangunan masing-masing. Undang-undang ini memberikan kewenangan dan keleluasaan pada pemerintah daerah melalui otonomi daerah kabupaten dan kota untuk memanfaatkan lahan dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional sesuai aspirasi dan kebijakan pemerintah daerah.

e. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.**

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pemberdayaan lahan tidur sebagai salah satu upaya untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan.

9. **Landasan Teoritis.**

a. **Analisis SWOT.**

Pendapat lain dikemukakan Freddy Rangkuti (1997) yang menyatakan bahwa pengertian Swot adalah proses identifikasi berbagai faktor yang dilakukan secara sistematis agar bisa merumuskan strategi organisasi dengan tepat. Analisis dilakukan berdasarkan logika yang bisa mengoptimalkan kekuatan serta peluang, tapi secara bersamaan analisis ini juga harus bisa meminimalkan ancaman dan kelemahan. Proses dalam pengambilan keputusan strategis diketahuimemang selalu berhubungan langsung

dengan kebijakan perusahaan, strategi, tujuan dan pengembangan misi.

Menurut Farrel dan Herline (2005), fungsi dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman).

b. **Pemberdayaan.**

Definisi pemberdayaan menurut Mc. Ardle, dikutip oleh Harry Hikmatya (2004:3), adalah proses pengambilan keputusan orang-orang yang secara konsekuen menjalankan keputusan yang diambil. Orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan oleh kemandirian mereka, bahkan ketika ada kebutuhan untuk menjadi lebih berdaya melalui upaya mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada bantuan dari luar. Itu dari Mc. Ardle tidak bertujuan untuk mencapai suatu tujuan semata, tetapi lebih mementingkan pentingnya suatu proses pengambilan keputusan sebagai langkah menuju pencapaian suatu tujuan.

Menurut Parsons yang dikutip Soeharto (2004), pemberdayaan adalah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kontrol dan pengaruh pada peristiwa dan institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Ite yang dikutip Soeharto, pemberdayaan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang lemah atau kurang mampu. Petani sebagai orang lemah dapat meningkatkan kekuatannya atas potensi yang dimilikinya. Kekuasaan mereka bisa muncul dari ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida kimia. Berpikirlah lebih baik dalam jangka panjang. Artinya masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri

Pembangunan nasional mencerminkan keinginan semua orang untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di

segala bidang kehidupan secara adil dan merata. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting dan kepuasannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu tinggi, bergizi, dan bermutu dengan harga yang terjangkau bagi daya beli masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama, pandangan dunia, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diciptakan sistem gizi yang melindungi baik yang memproduksi pangan maupun yang mengkonsumsinya.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok manusia maka tata kelola pangan harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam regulasi dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan. Artinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat atas produk pangan pada tingkat individu, negara berhak menentukan sendiri kebijakan pangannya, tidak dapat didikte oleh pihak manapun, dan pelaku usaha pangan memiliki kebebasan untuk menentukan dan melaksanakannya. keluar dari bisnis mereka sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk itu Memastikan konsumsi pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri melalui pemanfaatan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mencapai hal tersebut, tiga poin utama perlu diperhatikan: (i) ketersediaan pangan berdasarkan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) ketersediaan pangan ditinjau dari aspek fisik dan ekonomi bagi seluruh masyarakat, dan (iii) penggunaan atau konsumsi pangan dan nutrisi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

c. **Optimalisasi.**

Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, tetapi pada teori yang di jelaskan. Oleh W.J.S. Poerwadarminta³ beliau mengemukakan : “Optimalisasi

³ Poerwadarminta.2008. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka. H. 986.

adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”.

Untuk mewujudkan optimalisasi memerlukan suatu proses diantara aspek-aspek obyektif yang dikelola dengan mematuhi prosedur dan mekanisme agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada.

Suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu dengan optimalisasi seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya⁴.

Winardi⁵ mengatakan ”Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki”.

Dari pengertian yang dielaskan para pakar tersebut dapat ditarik prinsip bahwa optimal ini dapat diwujudkan dengan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien.

Permasalahan optimalisasi ada tiga elemen yang harus diidentifikasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang dibatasi⁶. Yaitu :

- 1) Tujuan. Ada 2 tujuan yaitu yang berhubungan dengan keuntungan dan penerimaam serta hal lain yang positif, maka dilakukan dengan maksimal. Sebaliknya yang berhubungan dengan biaya, jarak, waktu dan hal lain yang negative, perlu di minimalkan.

⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 26 Maret 2020

⁵ Winardi, (1999). *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung : Mandar Maju. h. 363

⁶ <http://wiramuhamad29.blogspot.com/2017/06/sejarah-ri-set-operasi.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2021

- 2) Alternatif Keputusan. Untuk mencapai Tujuan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan diperlukan beberapa alternative pilihan. Untuk mencapai keputusan yang diambil perlu adanya data aspek yang menjadi factor mempengaruhi.
- 3) Sumber daya yang dibatasi. Sumber daya yang dibatasi merupakan salah satu pengorbanan yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Ketersediaan sumber daya yang terbatas akan mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai optimalisasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa optimalisasi merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan meningkatkan kualitas yang dalam pewujudannya secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan sebuah organisasi tentu berharap dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien dengan optimal. Pemahaman secara efisien ini dikerjakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

10. **Data dan Fakta.**

Indonesia terletak di wilayah yang sangat strategis yaitu letak Astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi yang berpusat pada garis katulistiwa, Indonesia berada pada garis lintang 6° LU (Lintang Utara) - 11° LS (Lintang Selatan), Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang memiliki ciri-ciri curah hujan tinggi, terdapat

hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun dan kelembaban udara yang tinggi.

Garis bujur menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat bumi dari sebuah garis utara-selatan yang disebut Meridien Utama adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan. Garis bujur terletak di 0° berada di Greenwich yang juga digunakan secara internasional sebagai pedoman dalam menetapkan waktu.

Letak Indonesia berada di garis bujur 95° BT (Bujur Timur) - 141° BT (Bujur Timur) ini menyebabkan Indonesia memiliki tiga daerah waktu. Angin laut yang membawa banyak hujan, adanya dua musim dan iklim tropis di Indonesia ideal untuk berbagai usaha budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan pariwisata, merupakan dampak lain dari letak Indonesia diantara dua samudera besar. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap enam bulan sekali, berlalunya angin muson di wilayah Indonesia berdampak pada perubahan iklim.

Indonesia merupakan negara terpadat no 4 didunia, juga negara Maritim atau kepulauan terbesar di dunia. Yang memiliki 17.504 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km^2 . Luas wilayah Indonesia terbagi atas lautan dengan luas, 3,25 juta km^2 dan 2,55 juta km^2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif serta kurang lebih 2,01 juta km^2 yang berupa daratan, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar bila dilihat dari luasnya lautan.

Data Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (2016) menunjukkan total luas daratan Indonesia sekitar 191,1 juta ha, yang terbagi atas 43,6 juta ha lahan basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luasan tersebut, 15,9 juta ha di antaranya berpotensi untuk areal pertanian, yang terdiri atas 3,4 juta ha lahan APL (Areal Penggunaan Lain), 3,7 juta ha lahan HP (Hutan Produksi), dan 8,9 juta ha lahan HPK (Hutan Produksi dapat Dikonversi). Potensi ketersediaan sumber daya lahan untuk pengembangan padi sawah seluas 7,5 juta ha, tanaman pangan, cabai,

bawang merah dan tebu 7,3 juta ha, serta tanaman cabai dan bawang merah dataran tinggi 154,1 ribu ha.

Jumlah penduduk dari hasil Sensus Penduduk sesuai registrasi di semester II (Desember) tahun 2020 menurut BPS sebanyak 271,35 juta jiwa. Angka proyeksi produksi beras nasional menurut Badan Pusat Statistik sebesar 31,63 juta ton di tahun 2020. Pada tahun sebelumnya mencapai 31,31 juta ton, naik tipis dari total produksi. Menurut BPS ada surplus sekitar 2,26 juta ton ditahun ini dari total konsumsi beras nasional diperkirakan mencapai 29,37 juta ton pada tahun 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penurunan sebesar 0,19 persen luas panen padi Tahun 2020 hanya mencapai 10,66 juta hektar dibandingkan dengan Tahun 2019 sejumlah 10,68 juta hektar atau 20,61 ribu hektar. Hasil panen Gabah Kering Giling (GKG) sejumlah 54,65 juta ton lahan pertanian pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sejumlah 45,17 ribu ton atau sebesar 0,08 persen dibandingkan Tahun 2019 yang sejumlah 54,60 ton GKG. Pada Tahun 2020 jumlahnya mencapai 31,33 juta ton mengalami peningkatan sejumlah 21,46 ribu ton atau sebesar 0,07 persen dibandingkan Tahun 2019 sejumlah 31,31 juta ton setelah dikonversikan menjadi komoditas beras untuk bahan konsumsi pangan. Kenyataannya sangat ironi dengan peningkatan hasil produksi tiap tahunnya namun tidak mampu memutus rantai impor beras sebagai akibat penyusutan lahan pertanian. Penurunan ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan oleh kebijakan pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, perumahan, maupun fasilitas umum di satu sisi.

Menurut FOA badan pangan dunia PBB menerangkan bahwa populasi penduduk dunia saat ini berkisar 7 miliar dan diprediksi akan meningkat menjadi 9,1 miliar pada tahun 2050, untuk mencukupi kebutuhan pangan tersebut negara-negara dunia harus berupaya meningkatkan produksi pangan sampai 70% atau lebih sehingga masih ada persediaan cadangan pangan.

11. Lingkungan Startegis.

a. Lingkungan Global.

Terjadinya pemanasan global (*global warming*) beberapa tahun terakhir ini menjadi bencana besar di muka bumi. Pemanasan global dimana meningkatnya suhu permukaan bumi dan lautan akibat efek emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim yang sangat ekstrem. Beberapa Negara termasuk Amerika Serikat, merasakan dampak dari perubahan iklim tersebut. Terjadinya badai Katrina pada 29 Agustus 2005, menjadikan Negara adi kuasa tersebut mengalami kerusakan. Selain itu, badai ini merupakan musibah pantai terburuk yang menyebabkan tenggelamnya 80 persen kota atau lahan yang ada disekitarnya.

Sementara di Indonesia, cuaca ekstrem ini menyebabkan iklim yang tidak menentu dimana curah hujan yang turun tiap tahunnya tidak dapat diprediksi. Hal ini kadang menimbulkan volume air yang berlebihan sehingga terjadilah banjir. Banjir bandang yang melanda beberapa daerah menggerus dan menenggelamkan lahan pertanian. Hal ini tentunya akan berdampak pada turunnya produksi tanaman yang tentunya juga berpengaruh pada kondisi pangan nasional dan juga kondisi pangan di tingkat internasional.

Wabah pandemi Covid-19 bermula dari kota Wuhan Cina menyebar ke 223 negara di dunia terkonfirmasi 207.784.507 jiwa, meninggal 4.370.424 jiwa (sumber WHO, update 18 Agustus 2021). Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua, merosotnya ekonomi Tiongkok bakal berdampak terhadap perekonomian global pada 2020. Hal ini terlihat dari proyeksi yang dilakukan sejumlah lembaga. EIU menurunkan target pertumbuhan ekonomi global dari 2,3 persen menjadi 2,2 persen. Sementara Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,4 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 2,5 persen. Termasuk negara Indonesia

terdampak dengan PDB tahun 2020 mengalami kontraksi 4,51% dari tahun lalu.

b. **Lingkungan Regional.**

Eksplorasi sumber energi fosil secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar berbagai macam industri di seluruh dunia. Kebutuhan energi dunia terus mengalami peningkatan. Menurut proyeksi Badan Energi Dunia (International Energy Agency-IEA), hingga tahun 2030 permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahun. Sebagian besar atau sekitar 80% kebutuhan energi dunia tersebut dipasok dari bahan bakar fosil.

Berdasarkan proyeksi IEA selama periode 2006-2030, permintaan energi dunia sebagian besar berasal dari negara non OECD yakni sebesar 87 %. Pertumbuhan permintaan energi China diproyeksikan paling besar diantara kawasan lain. India, belakangan ini juga memperlihatkan pertumbuhan permintaan energi cukup besar satu tingkat dibawah China. Akibatnya banyak alih fungsi lahan pertanian berkurang, terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem lingkungan sehingga produksi pertanian akan menurun.

Polusi atmosfer dan Deforestasi akibat kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan mengakibatkan kerusakan lahan menimbulkan adanya ketegangan antara Malaysia dan Singapura dengan Indonesia sebagai negara penghasil polutan. Negara Malaysia dan Singapura melayangkan protes keras karena mengganggu pernafasan, keselamatan penerbangan dan pelayaran. Di Indonesia sendiri selain menyebabkan gangguan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (IsPa), kebakaran hutan dan asap tentu akan merusak tanaman pertanian di sekitarnya dan mengganggu para petani sehingga tidak dapat mengelola pertanian akibatnya hasil pertanian akan menurun.

c. **Lingkungan Nasional.**

Akibat perubahan iklim global yang ekstrim mengakibatkan geografi Indonesia terutama perubahan cuaca menjadi tidak menentu, dan sering berubah tidak dapat diprediksi, mengakibatkan musim tanam yang tidak tepat sehingga hasil tanaman tidak maksimal.

Bonus demografi Indonesia saat ini dan kedepan perlu diimbangi dengan cukupnya ketersediaan konsumsi bahan pangan dan lapangan pekerjaan sehingga pemerintah harus mengantisipasi lebih awal agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari .

Eksplorasi sumber energi fosil secara besar-besaran dan tidak terkendali akan merusak lingkungan alam, menimbulkan polusi, limbah berbahaya dan beracun serta mengganggu ekosistem lingkungan sehingga akan mempengaruhi lahan pertanian.

Pemerintah dan DPR mengeluarkan keputusan politik untuk percepatan penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta pengadaan Vaksin melalui kebijakan Refocusing anggaran.

Sejak diserang COVID-19, ekonomi Indonesia terus-terusan berada di zona negatif. Di kuartal II-2020, ekonomi RI langsung jeblok hingga -5,32%, di kuartal III-2020 mulai terjadi perbaikan menjadi -3,49% tapi masih berada di zona negatif, di kuartal IV-2020 pun demikian meski membaik menjadi -2,19% tapi tetap saja belum berhasil mencatatkan pertumbuhan yang positif.

Realisasi itu menunjukkan bahwa RI belum mampu keluar dari jurang resesi. Hal ini terjadi karena pergerakan manusia belum kembali seperti sebelum adanya pandemi COVID-19.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penganggur pada Februari 2020 mencapai 8,75 juta. Jumlah penganggur ini meningkat secara tahunan dari 6,93 juta pada Februari 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Dampak pandemi terhadap pertahanan dan keamanan adalah adanya rasa curiga dan kewaspadaan yang tinggi terhadap sekitarnya, tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi Covid-19 menurut data statistik kejahatan yang dicatat Polri terjadi kenaikan sekitar 7.04%, adanya sejumlah narapidana asimilasi yang mengulangi kejahatan menjadi salah satu faktor meningkatnya kejahatan.

Kebijakan Pemerintah untuk percepatan penanggulangan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan PSBB/PPKM serta percepatan Vaksinasi kepada seluruh warga masyarakat seperti yang diatur oleh pemerintah. Percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan stimulus kepada rakyat miskin dan UMKM terdampak dengan insentif, fasilitas pinjaman ringan dan pendampingan.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Pemberdayaan lahan dan pembangunan bidang pertanian harus diarahkan secara jelas kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya petani melalui pembangunan sistem dan usaha pertanian yang mapan baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, ramah lingkungan, berteknologi dan desentralistik. Selanjutnya dalam proses pembangunan pertanian tentu mengalami adanya kendala atau hambatan, ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga perlu diadakan pemecahan persoalan tersebut agar optimalisasi pemberdayaan lahan tidur dapat diolah menjadi lahan yang produktif dan mendapatkan manfaat ekonomis.

Perubahan dinamika sosial seperti penambahan penduduk yang berlangsung secara cepat menurut deret ukur sedangkan ketersediaan bahan pangan seperti deret hitung dan perubahan iklim ekonomi serta perubahan iklim sebagai akibat pemanasan global menuntut pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat Indonesia agar mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Dengan kata lain segala usaha harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat guna mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

Di masa yang akan datang diharapkan bangsa Indonesia mampu mengimplementasikan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi pemberdayaan lahan tidur dalam rangka mendukung ketahanan pangan Nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan, pemanfaatan/penggunaan dan kemajuan iptek, termasuk didalamnya penggunaan teknologi tepat guna, penyediaan infrastruktur fisik yang mendukung pengelolaan pertanian. Untuk mencapai hal itu maka diperlukan manajemen perencanaan dan pengelolaan yang bersifat

komprehensif secara terpadu antar kegiatan yang dikelola setiap instansi yang terkait dengan usaha pembangunan pertanian berkelanjutan.

13. **Kendala Yang Dihadapi Pada Pemberdayaan Lahan Tidur Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan.**

Wilayah Indonesia masih cukup luas potensi dan ketersediaan sumberdaya lahan untuk pertanian, namun pada masa yang akan datang diprediksi akan terjadi kompetisi pemanfaatan antar sektor dan sub sektor pembangunan, diantaranya aspek pangan dan aspek bioenergi, demikian juga antara pertanian dengan non pertanian. Persoalan-persoalan yang sering muncul terkait dengan pengelolaan sumber daya lahan yaitu sebagai berikut :

a. **Degradasi sumber daya lahan.**

Aktivitas pengelolaan sumber daya lahan memberikan pengaruh yang positif dan juga mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan alam. Hasil yang positif tentunya digunakan secara maksimal dan harus mengantisipasi kemungkinan resiko yang akan terjadi. Perencanaan yang tepat dalam mengantisipasi kemungkinan yang terburuk yang diakibatkan sumberdaya lahan, sedangkan manfaat harus ditingkatkan agar kegiatan pembangunan berdampak optimal terhadap lingkungan biofisik, sosial dan ekonomi.

Degradasi lahan dapat diakibatkan oleh aktivitas pembangunan industri, pertambangan, properti dan kegiatan lain. Pemerintah, korporasi dan masyarakat belum sepenuhnya mengelola kegiatan tersebut secara terpadu, maka ancamannya terhadap keberlangsungan usaha pertanian dan degradasi lahan itu sendiri. Rencana kegiatan pembangunan harus berorientasi pada keletarian lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk masa depan.

Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan kerusakan lingkungan biofisik, lahan menjadi tidak produktif, struktur lahan menjadi kritis dan terlantar tidak digarap sehingga ditumbuhi semak

belukar. Degradasi lahan tidur dan menjadi lahan kritis luasnya sekitar 48,3 juta ha atau 25,1% dari luas wilayah Indonesia. Lahan gambut di Indonesia dengan luas sekitar 14,9 juta ha, \pm 3,74 juta ha atau 25,1 % dari total luas gambut telah terdegradasi dan ditumbuhi semak belukar. Penggunaan lahan untuk usaha pertambangan, penggunaan lahan untuk pertanian yang tidak terkontrol, konversi lahan yang tidak sesuai merupakan tanda-tanda adanya degradasi lahan.

Sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) diakibatkan degradasi lahan baik di tanah mineral maupun gambut ini terjadi karena rentan terhadap kebakaran di musim kemarau panjang. Sesuai Perpres No. 61 tahun 2011 bahwa “rehabilitasi lahan terdegradasi/terlantar harus memprioritaskan investasi pada sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit untuk produksi pertanian/perkebunan yang berkelanjutan”, dan himbauan dari Kelompok Bank Dunia, hal tersebut perlu direalisasikan secara nasional.

Indonesia perlu penguatan kebijakan pengelolaan lahan secara terintegrasi, dapat diakses dan terkoneksi dengan lembaga dan institusi terkait dengan data –data dan penyajian secara mutakhir dalam kebijakan satu peta dan data base yang kuat.

b. **Alih fungsi lahan pertanian.**

Adanya pertumbuhan dan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat yang sedang berkembang akan berakibat pada alih fungsi lahan pertanian. Perkembangan tersebut tercermin dari adanya:

- 1) Meningkatnya kebutuhan hidup seperti perumahan, tempat usaha dan fasilitas umum, menjadi penyebab alih fungsi lahan pertanian.
- 2) Adanya pergeseran kontribusi sektor pembangunan dari sektor-sektor primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor-sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa).

Produksi Pajalegu (padi/beras, jagung, kedelai dan gula) sebagai kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri belum bisa terealisasi dan sebagian masih impor. Untuk mencapai swasembada bahan pokok tersebut banyak faktor yang harus dibenahi dan direncanakan secara komprehensif serta menghadapi adanya alih fungsi lahan yang terus bertambah.

Pemanfaatan lahan pertanian untuk digunakan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota tersebut jika terjadi, maka ancaman terhadap keberlanjutan swasembada pangan akan lebih besar, demikian juga ketersediaan pangan. Untuk setiap hektar lahan sawah yang beralih fungsi diperlukan seluas 2,2 ha lahan sawah pengganti untuk menutupi kehilangan produksi karena tingginya produktivitas lahan sawah yang ada dan banyaknya masalah yang dihadapi pada lahan sawah bukaan baru.

c. **Kompetisi penggunaan lahan.**

Persaingan penggunaan lahan pertanian seperti kebutuhan infra struktur, pemukiman, industry dan pertambangan akan sangat kuat tarik menarik dengan keputusan dan kebijakan pemerintah. Kebutuhan penggunaan lahan perlu adanya pengaturan atau regulasi secara tegas dan komprehensif terkait dengan institusi lain. Dengan harapan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada pemilik lahan maupun pengelolaan lahan pertanian.

Sebagaimana persetujuan Paris (Paris Agreement) pengurangan emisi gas karbon dari efek rumah kaca dan pengurangan menggunakan energi fosil. Sekarang ini negara berlomba untuk memanfaatkan energi baru terbarukan dan ramah terhadap lingkungan, salah satunya adalah tanaman sawit untuk energi biodisel. Sehingga perlu adanya lahan yang luas untuk penanaman pohon tersebut dan tentunya lahan akan menjadi ajang kompetisi dalam penggunaan lahan.

d. **Fragmentasi lahan atau penyusutan kepemilikan lahan pertanian.**

Hasil produktifitas petani akan cenderung terus berkurang seiring dengan sistem bagi hasil hak waris dan pengalihan fungsi lahan. Lahan pertanian yang ada namun tidak diusahakan akan semakin tidak produktif. Dengan bertambahnya kebutuhan hidup maka seringkali lahan yang tidak di kelola dijual dengan harga yang lebih rendah. Banyaknya lahan pertanian warisan yang dijual dengan harga yang murah tentunya lahan yang dimiliki akan terus menyusut dan tidak mampu memberikan penghasil dan kesejahteraan. Akibatnya petani akan kehilangan lahan garapannya dan akan kehilangan pendapatannya, serta petani yang tadinya pemilik lahan sendiri akan menjadi buruh dilahannya sendiri. Selanjutnya akan sulit untuk mendapatkan lahan garapannya kembali.

Masyarakat petani yang terbatas secara ekonomi memiliki sebidang tanah warisan yang masih dikelola namun karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat tidak ada pilihan lain harus menjual atau menyewakan kepada pihak lain. Selanjutnya beberapa masyarakat petani yang serupa tidak lagi menguasai lahan bahkan menjadi buruh dan tidak terkonsentrasi dalam satu kawasan pertanian tetapi terfragmentasi.

Adanya adat dan budaya dimana orang tua membagikan harta berupa lahan pertanian kepada anak-anaknya, yang semula luas dalam satu hamparan menjadi terpetak-petak sempit. Lahan yang menjadi sempit tidak lagi ekonomis dan efektif serta tidak dapat diandalkan lagi untuk mendapatkan hasil sehingga digadaikan atau dijual.

e. **Sumber daya manusia.**

Permasalahan yang menentukan terkait dengan SDM pada dasarnya adalah kurangnya pendidikan dan keterampilan dalam pengelolaan tanah pertanian. Keterbatasan petugas penyuluh

pertanian dalam memberikan bimbingan dan pendampingan aktivitas pertanian.

Dalam membangun pertanian yang moderen negara-negara maju dan berkembang tidak hanya meningkatkan sistem pertanian saja tetapi juga memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Membangun SDM petani tidak sebatas tentang pengelolaan lahan pertanian saja namun juga kemampuan petani dalam berpartisipasi untuk berperan dalam proses pembangunan yang demokrasi.

Keterbatasan kemampuan dan keterampilan SDM petani dalam mengelola lahan juga akan mempengaruhi produktivitas pertanian demikian juga keberlangsungan usaha pertanian. Hal tersebut juga menjadi kelemahan dalam mengelola kelompok tani dalam berpartisipasi melalui organisasi petani mandiri.

Kualitas lembaga pertanian dan penyuluh lapangan juga memberikan andil dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani untuk mengelola lahan secara mandiri. Kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain atau korporasi untuk berpartisipasi untuk memajukan sektor pertanian yang lebih kompetitif, efisien, dan efektif.

Dalam upaya menganalisa dan menyusun optimalisasi pemeberdayaan lahan tidur dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan maka dapat diidentifikasi indikator-indikator yang dapat dijadikan pendukung dan penghambat dalam tercapainya ketahanan pangan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan baik eksternal dan internal dan internet untuk satu tujuan yang didasarkan pada logika yang optimal untuk kekuatan (Stengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Tehnik analisis SWOT secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi, serta peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. SWOT adalah salah satu tehnik pemecahan permasalahan dalam berbagai terapan sebagai bahan pimpinan dalam menentukan keputusan selanjutnya. SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi.⁷

Mengacu kepada faktor-faktor yang mempengaruhi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) maka dapat disusun matrik SWOT yang berkaitan dengan optimalisasi pemberdayaan lahan tidur dalam meningkatkan ketahanan pangan sebagai berikut :

Tabel Analisa SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pemerintah - Regulasi MoU Menteri Pertanian - Stigma negara Agraris 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM masih rendah - Sarana dan prasarana terbatas
Peluang (Opportunities)	Strategi SO (Kuadran I)	Strategi WO (Kuadran II)
<ul style="list-style-type: none"> - Tanah yang masih Luas - Dukungan Pemda dan swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasikan UU no 41 tahun 2009 - Berikan insentif/fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Diklat - Gunakan inovasi teknologi
Kendala (Treaths)	Strategi ST (Kuadran III)	Strategi WT (Kuadran IV)
<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geografis - Hak Ulayat 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk kelompok petani - Menyusun regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Berikan Bimbingan teknis - Kerjasama bangun sarpras

⁷ Jogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi, Edisi IV* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010.) h. 46

Sebagai kebijakan pemerintah dengan diterbitkannya UU no. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan pemerintah dapat menahan laju konversi lahan sawah terutama lahan irigasi teknis sehingga mampu mendukung produktifitas pertanian. Kedua adalah penetapan batas kawasan pertanian berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten dan Lahan pertanian pangan berkelanjutan serta lahan cadangan ditetapkan dalam rencana rinci/detail tata ruang (RDTR) kabupaten. Ketiga pembangunan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (kawasan P2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diprioritaskan pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Keempat Upaya pendampingan dan pembinaan atas petani telah banyak dilakukan dan menjadi tugas rutin dari Dinas Pertanian/Tanaman Pangan di daerah. Kelima adalah pemerintah memberikan perhatian khusus dalam pengendalian LP2B meliputi aspek insentif, disinsentif dan alih fungsi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi degradasi lahan tersebut adalah dengan memanfaatkan dengan tanaman kayu yang membutuhkan sedikit nutrisi dari pada tanaman sayuran dan buah-buahan. Apabila berada di tengah kota bisa dijadikan Ruang Terbuka Hijau atau taman kota. Upaya yang kedua adalah khusus untuk lahan kering dengan membuat teras dipermukaan tanah untuk mengurangi aliran air yang ada di permukaan tanah sehingga kelembaban tanah terjaga. Berikutnya adalah dengan membuat pelepasan air untuk lahan di daerah dengan curah hujan tinggi atau teras sering di daerah lembah agar kondisi tanah tidak jenuh dengan air. Selanjutnya adalah dengan upaya reboisasi terhadap lahan yang sudah sangat kritis untuk menyelamatkan lingkungan, tanah, air dan udara serta ekologi wilayah tersebut. Yang terakhir upaya untuk menghindari degradasi adalah tidak membakar hutan maupun semak pada musim kemarau.

Adapun upaya untuk mengurangi kompetisi penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan penggunaan lahan non pertanian, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memiliki komitmen

yang kuat untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para petani sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Upaya pemerintah tersebut dimaksudkan agar para petani mempertahankan lahan pertanian pangan untuk digarap guna peningkatan produktifitas tanaman pertanian dalam rangka memenuhi kebutan pangan khususnya di daerah tersebut dan umumnya untuk ketahanan pangan.

Hal ini perlu adanya perhatian ekstra dari pemerintah daerah sampai tingkat desa melalui sosialisasi dan penyuluhan agar timbul kesadaran dari dalam diri masyarakat petani untuk mengelola sawah atau lahan pertanian untuk tidak dialih fungsikan pada kegiatan non pertanian.

Sebagai upaya dalam mengatasi masalah fragmentasi lahan pertanian adalah dengan membentuk kelompok-kelompok tani dengan bimbingan penyuluh pertanian, usaha tersebut dimaksudkan untuk memberikan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan lahan pertanian. Berikutnya adalah dengan kerjasama pertanian dengan badan swasta atau perorangan dengan kelompok petani sehamparan dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan pertanian pangan. Tujuannya jangka panjang adalah untuk mewujudkan usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan pertanian secara korporasi.

Kemampuan dan keterampilan petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan lahan dan penanaman. Tentunya dengan SDM yang unggul petani akan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya dengan teknologi yang moderen. Dengan dukungan pemerintah dan pihak swasta diharapkan tenaga penyuluh lapangan dapat memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para petani.

Membangun SDM pertanian mencakup berbagai aspek diantaranya aspek produksi, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek ekologi, juga tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan strategis dan mekanisme produksi. Sumber daya manusia diberdayakan dengan baik agar mampu meningkatkan produksi secara efektif dan efisien.

Undang-undang RI no. 7 tahun 1996 tentang Pangan dan diperkuat oleh Undang-undang RI no. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi landasan tekad dan komitmen yang kuat bagi presiden untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang akan terus meningkat. Selanjutnya pada tahun 2011 presiden mengeluarkan Intruksi Presiden yakni Inpres Nomor 5 tahun 2011 dalam upaya mengamankan produksi gabah/beras nasional serta mewaspadaikan dan ketanggap segera untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim, dengan menginstruksikan kepada 18 elemen Negara salah satunya kepada Panglima Tentara Nasional untuk mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan dan bantuan pada program Kementerian pertanian. Kerjasama Kementerian Pertanian dengan pihak-pihak lain seperti contohnya dalam MoU Kementan dengan TNI AD pada tahun 2012 dalam rangka cetak sawah untuk swasembada beras.

Untuk menyelesaikan kelemahan sumberdaya manusia yang terbatas maka perlunya dioptimalkan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga terkait seperti Pertanian, swasta, serta institusi yang telah melakukan MoU untuk menambah tenaga penyuluh pertanian, melakukan diklat atau penataran dan sosialisasi kepada kelompok petani maupun masyarakat agar memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola lahan tidur agar lebih bermanfaat.

Sedangkan untuk menyelesaikan kelemahan sumber daya manusia dan keterbatasan saran-prasarana dihadapkan dengan kendala letak lokasi luas yang jauh dan kepemilikan lahan Ulayat maka Pemerintah daerah berinisiatif dengan melakukan MoU dengan Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian untuk memberikan masukan atau saran dari hasil kajian penerapan teknologi pertanian. Para Akademisi memberikan masukan berupa kajian-kajian dalam meningkatkan pengelolaan pertanian, peningkatan SDM, dan teknologi pertanian untuk diterapkan pada skala mikro maupun makro industrialisasi. Hal ini meningkatkan efektifitas dan efisiensi industrialisasi, meliputi serangkaian program, diantaranya:

- a. Pengembangan sumber daya manusia (petani) oleh akademi maupun partner industri.
- b. Persiapan penanaman modal untuk pengembangan dan penambahan alshintan.
- c. Penerapan konsultasi dan pengawasan dalam penanganan pola tanam yang efektif dan efisien kepada para petani sehingga dapat memenuhi kualitas standart yang diterapkan oleh industri.
- d. Pengembangan dan penerapan operasi prosedur standar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan petani.
- e. Inisiasi dan memperkuat jaringan dengan perusahaan untuk pemasaran hasil panen.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kuatnya komitmen pemerintah yang dituangkan dalam instruksi presiden, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) dan perjanjian kerjasama (MoU) serta dukungan pemerintah daerah dengan memberikan subsidi dan keringanan pembiayaan pertanian maka diharapkan kendala seperti lahan dapat diselesaikan dengan program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, kendala terhadap sumberdaya manusia bisa dilakukan dengan pendidikan dan latihan dengan bimbingan penyuluh pertanian. Di tambah kuatnya tekad Pemerintah daerah untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.

14. **Sarana dan prasarana Pertanian dalam Optimalisasi Pemberdayaan Lahan Tidur.**

Upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan lewat perluasan lahan dan dukungan saran prasarana belum banyak memberikan hasil. Mundurnya target waktu produksi pangan menjadi evaluasi terhadap kendala-kendala dilapangan, ternyata sinkronisasi data yang akurat serta

validitas dilapangan sangat penting agar perencanaan dapat direalisasikan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta dapat dievaluasi.

Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) mengatakan ada lima persoalan yang membuat perluasan lahan pertanian mandek, yaitu :

- a. Akses jalan menuju lokasi perluasan dan pengelolaan sulit. Belum tersedianya jalan yang baik akan mengganggu penyaluran pupuk dan transportasi hasil panen, tentunya juga akan mempengaruhi harga hasil panen.
- b. Permasalah pupuk dan bibit tanaman. Baik pupuk yang bersubsidi dan non subsidi terjadi kekurangan dikarenakan juga pergudangan didaerah terbatas, demikian juga bibit tanaman yang belum tersedia dengan untuk memenuhi kebutuhan petani
- c. Alat mesin pertanian dan operatornya. Ketersediaan Mesin dan peralatan pertanian belum mencukupi kebutuhan petani, dan operator alsinta sangat terbatas.
- d. Dukungan APBD rendah. Kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam program pembangunan daerah sangat dipengaruhi dengan target dan prioritas pengembangan daerah, sehingga alokasi anggaran untuk sektor pertanian tentunya akan lebih sedikit porsinya.
- e. Laporan hasil pelaksanaan masih lemah pada tingkat kabupaten dan provinsi. Hal tersebut menimbulkan akurasi data dan kelengkapan data menjadi berkurang.

Sarana prasarana masih menjadi persoalan para petani kita diantaranya persoalan luas lahan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bermasalah. Kelangkaan pupuk dan penggunaan pupuk yang tidak sesuai ketentuan menambah persoalan tentang pupuk. Kondisi ini terjadi karena lemahnya pengawasan distribusi pupuk.

Sawah basah membutuhkan air yang cukup untuk padi tumbuh subur yang menjadi problem adalah jaring irigasi dan bak penampungan yang belum dibangun dengan baik. Berbeda dengan sawah tadah hujan yang tidak banyak membutuhkan air untuk tumbuh, tetapi tingkat produksinya lebih sedikit dari sawah lahan basah. Sehingga hasilnya juga tidak sebanyak sawah lahan basah yang dapat panen 2 kali setahun.

Permasalahan bibit tanaman yang bermutu, pupuk dan pestisida/ obat-batan serta alat mesin pertanian yang terbatas perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah serta pengawasan dari pihak-pihak yang terkait. Bahkan dengan keterbatasan dan kelangkaan pupuk para mafia memasarkan bibit unggul palsu dan pupuk juga dipalsukan.

Sebagai analisa SWOT mengacu kepada faktor-faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan optimalisasi pemberdayaan lahan tidur dalam meningkatkan ketahanan pangan sebagai berikut :

Tabel Analisa SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pemerintah - Regulasi MoU Menteri Pertanian - Stigma negara Agraris 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM masih rendah - Sarana dan prasarana terbatas
<p style="text-align: center;">Peluang (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanah yang masih Luas - Dukungan Pemda dan swasta 	<p style="text-align: center;">Strategi SO (Kuadran I)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasikan UU no 41 tahun 2009 - Berikan insentif/fasilitas 	<p style="text-align: center;">Strategi WO (Kuadran II)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Diklat - Gunakan inovasi teknologi
<p style="text-align: center;">Kendala (Treaths)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geografis - Hak Ulayat 	<p style="text-align: center;">Strategi ST (Kuadran III)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk kelompok petani - Menyusun regulasi 	<p style="text-align: center;">Strategi WT (Kuadran IV)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan Bimbingan teknis - Kerjasama bangun sarpras

Komitmen pemerintah dalam rangka mengatasi dampak pandemi diseluruh sistem pangan dan tetap menyediakan pangan bagi 270 juta rakyat Indonesia, dengan fokus pada upaya menjaga rantai pasokan pangan dengan meningkatkan kapasitas produksi bahan pangan, memperkuat cadangan pangan pusat, daerah dan masyarakat, serta meningkatkan sistem logistik pangan nasional. Lebih lanjut pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk membantu serta melindungi para petani melalui penyediaan jaringan pengaman sosial, program bantuan sosial, dan subsidi bunga kredit alat pertanian agar petani dapat tidurkktivitas dengan aman dan nyaman sehingga produksi pertanian dapat meningkat.

Upaya untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan adanya komitmen pemerintah yang kuat dan tersedianya lahan yang cukup maka prasarana dan infrastruktur yang memadai dapat dibangun untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis pangan dan hortikultura.

Adanya kerjasama antar pemerintah dengan instansi terkait akan membantu petani terutama keterbatasan dan meningkatnya harga sarana produksi pertanian seperti Pupuk dan obat obatan sangat berdampak pada tingkat keberhasilan usaha tani. Keterlibatan institusi seperti TNI-Polri dalam pendampingan dan pengawasan penyediaan sarana pertanian seperti bibit dan pupuk untuk menjamin ketersediaan dan distribusinya.

Kerjasama pemerintah dengan swasta untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan dengan mengembangkan penangkar bibit unggul dan bermutu, membangun kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, seperti koperasi dan kelompok usaha tani mendorong pemakaian pupuk organik, pestisida dan obat-obatan yang ramah lingkungan.

Kelemahan yang sering dialami oleh masyarakat petani pada saat pemasaran produknya adalah dengan kepemilikan modal yang kecil, hasil produksi yang tidak tahan lama dan mudah rusak, sistem transportasi yang belum mendukung, usaha dengan skala yang kecil, lembaga pemasaran

yang belum berjalan dengan baik , adanya tengkulak yang menekan harga, serta biaya-biaya transportasi diluar yang resmi, adanya pungutan-pungutan selama distribusi, belum lagi resiko kegagalan panen.

Petani tidak mendapatkan informasi mengenai produksi dan kebutuhan bahan pada suatu daerah sehingga sering salah satu bahan menumpuk atau berlebih disatu daerah sehingga akan mempengaruhi harga, sementara di tempat lain kekurangan bahan tersebut. Kelemahan struktur lembaga dalam menyediakan informasi yang dapat diakses oleh petani. Sehingga perlunya membangun system informasi produk barang dan tempat kebutuhan konsumsi barang.

Mahalnya biaya distribusi dan pemasaran masih menjadi permasalahan ditingkat petani sehingga petani lebih mudah menjual di tempat. Untuk mengatasi hal tersebut perlunya pemerintah untuk mengatur system tata niaga yang lebih praktis dan efisien untuk mengurangi pengeluaran yang lebih dari proses pemasaraan, sehingga petani lebih diuntungkan. Selanjutnya pemerintah perlu membantu petani dengan menyalurkan hasil produksinya atau membantu dalam pemasaran dan tempat penyimpanan produk sebelum dipasarkan .

Kesulitan sebagai petani kecil biasanya adalah permodal awal untuk memulai menggarap usaha pertanian, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan dana desa dapat menjadi pilihan yang cepat dan mudah. Pemberian fasilitas dana desa bisa dengan system perjanjian kerja sama atau bagi hasil dengan kesepakatan sehingga akan saling menguntungkan..

Adanya kelemahan sarana dan prasarana seperti embung atau waduk dan saluran irigasi, ketersediaan pupuk dan bibit serta permodalan petani maka dengan peluang dengan luasnya lahan serta dukungan pemerintah daerah maka program pembangunan instalasi irigasi sebagai sarana penting bagi pertanian dapat dianggarkan selanjutnya dilaksanakan pembangunan dan pemberian subsidi pupuk dan bibit serta pinjaman modal dengan bunga ringan.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat untuk mewujudkan program peningkatan ketahanan pangan dan dukungan pemerintah daerah serta partisipasi swasta dan masyarakat maka kendala-kendala yang menjadi hambatan dapat diatasi dan diselesaikan secara bersama-sama, karena pangan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat.

15. **Bagaimana Optimalisasi Pemberdayaan Lahan Tidur dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan.**

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau memang memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar, baik berupa tanah kering, lahan rawa dan lahan gambut, namun sayangnya belum dapat digunakan secara optimal baik untuk perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan serta penggunaan fungsi lain seperti infrastruktur. Namun jika lahan tersebut tidak dikelola dengan bijak akibatnya akan berpotensi juga menimbulkan berbagai permasalahan lahan.

Agar lahan usaha tani dapat lebih produktif maka perlu meningkatkan penggunaan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan. Upaya secara optimal untuk memanfaatkan lahan tidur disertai daya dukung yang memadai seperti tenaga penyuluh pertanian untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat petani dan ketersediaan pupuk yang terjangkau bahkan bersubsidi serta penyediaan pasar yang luas akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat petani dalam memberdayakan lahan tidur sekitar tempat tinggalnya.

Luas lahan pertanian dirasa semakin berkurang karena adanya kebutuhan lahan untuk proyek infrastruktur yang lain, sehingga terjadi alih fungsi tetapi ternyata ada penggunaan lahan yang buruk dalam pengelolaan sehingga lahan tersebut menjadi terlantar dan gersang.

Termasuk diantaranya lahan pribadi yang semula ditujukan untuk investasi namun tidak mendapatkan nilai manfaat ekonomi sehingga

terbengkalai dalam waktu yang lama dapat digolongkan sebagai Tidur/lahan tidur.

Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1998 mengatur tentang pemanfaatan tanah kosong lahan tidur untuk tanaman pangan. Dimaksudkan adalah lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Dengan adanya peraturan menteri ini dapat memberikan pedoman bagi masyarakat petani terutama yang tidak memiliki lahan garapan untuk memberdayakan lahan tidur, setidaknya petani tidak mengeluarkan biaya sewa lahan untuk mengelola lahan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Ada juga faktor lain yang mempengaruhi selain karena faktor kondisi kesuburan tanah. Investasi tanah yang menjanjikan membuat pemilik lahan membiarkan lahannya terlantar sebagai investasi guna dijual beberapa tahun kemudian. Tanah sengketa mengalami kendala administrasi dalam pemindahan kepemilikan sampai dengan diselesikannya urusan sengketa di pengadilan.

Lahan tidur terutama pada lahan tidur yang berupa tanah gambut yang tidak dioptimalkan penggunaannya sebetulnya bisa menimbulkan bahaya kebakaran jika di atasnya ditumbuhi semak belukar, maka perlunya menjadi perhatian pemerintah daerah terhadap lahan gambut dimusim kemarau.

Mengacu kepada faktor-faktor yang mempengaruhi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) maka dapat disusun matrik SWOT yang berkaitan dengan optimalisasi pemberdayaan lahan tidur dalam meningkatkan ketahanan pangan sebagai berikut :

Tabel Analisa SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pemerintah - Regulasi MoU Menteri Pertanian - Stigma negara Agraris 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM masih rendah - Sarana dan prasarana terbatas
Peluang (Opportunities)	Strategi SO (Kuadran I)	Strategi WO (Kuadran II)
<ul style="list-style-type: none"> - Tanah yang masih Luas - Dukungan Pemda dan swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasikan UU no 41 tahun 2009 - Berikan insentif/fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Diklat - Gunakan inovasi teknologi
Kendala (Treaths)	Strategi ST (Kuadran III)	Strategi WT (Kuadran IV)
<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geografis - Hak Ulayat 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk kelompok petani - Menyusun regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Berikan Bimbingan teknis - Kerjasama bangun sarpras

Dalam proses pengelolaan lahan perlu mempelajari latar belakang yang menjadi penyebab permasalahan lahan untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Dengan kerjasama antara pemerintah dan lembaga peneliti atau akademisi guna mendapatkan Analisis karakteristik terhadap lahan tidur untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan terlantar, sehingga pemanfaatan lahan tersebut tepat guna.

Contohnya seperti lahan tidur gambut di Kalimantan Barat. Pada lahan gambut yang gersang dan terbengkalai, dibudidayakan tanaman lidah buaya dari varietas chinensis telah diterapkan sejak 1990-an.

Mengatasi lahan tidur yang kurang unsur hara dan nutrisi perlu diatur pola penanaman yang bisa digunakan. Pola rotasi penanam tumbuhan sesuai dengan karakteristik tanah tersebut agar unsur –unsur hara tanah pulih kembali seperti misalnya dengan pembudidayaan tanaman yang

pertumbuhannya lambat seperti pohon berkayu. Selain itu dengan memberikan pemupukan dengan organik maupun non organik yang kadarnya rendah dan ramah lingkungan.

Tanaman berjenis kayu yang membutuhkan sedikit nutrisi dapat diterapkan pada lahan yang miskin nutrisi sebagai pengganti tanaman pangan sebagai alternatif mendapatkan tambahan penghasilan sebelum ditanami dengan tanaman pangan.

Pemilik lahan enggan tidak mau repot mengelola tanah yang letaknya strategis yang ada tetapi juga tidak ingin kehilangan lahan tersebut dan bisa memberikan pendapatan maka lahan tersebut cukup disewakan kepada orang lain atau penggarap.

Mengajukan surat permohonan kemudahan prosedur perijinan dapat diajukan kepada stakeholder dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan mulai dari kepala desa dan seterusnya. Sementara itu, untuk permasalahan internal seperti sengketa kepemilikan lahan akibat harta waris dalam keluarga dapat diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga.

Sawah sebagai lahan basah menjadi andalan utama upaya prioritas dalam mempertahankan ketersediaan beras serta menjaga swasembada beras. Sedangkan penggunaan lahan kering untuk penanaman produk Jagung, kedelai dan produk pangan juga untuk menuju swasembada.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan persaingan ekonomi global maka kebutuhan pangan juga akan meningkat tajam maka usaha peningkatan produksi bahan pangan dan produk pertanian lainnya mutlak diperlukan. Upaya kerjasama yang terintegrasi dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian prospektif yang berorientasi agribisnis dengan menawarkan kesempatan kepada para investor untuk mengembangkan usaha dan sistem agribisnis yang berkelanjutan.

Keterbatasan informasi yang bisa di peroleh oleh petani sangat terbatas sehingga petani kurang mendapatkan informasi tentang kebutuhan konsumsi disuatu daerah, sarana transportasi yang tersedia, cuaca daerah yang berlaku. Dengan adanya informasi tentang data-data pertanian dan

mekanisme distribusi serta pemasaraan petani akan lebih mudah mengelola tanah sampai dengan pemberian pupuk dan panen serta pemasaran yang lebih efisien dan ekonomis.

Adanya Sistem Informasi Geospasial (SIG) dapat menyediakan informasi potensi sumberdaya lahan, maka pengembangan berbagai komoditas pertanian dapat disesuaikan dengan potensi sumberdaya lahannya, sehingga membantu upaya peningkatan produksi komoditas pertanian yang bersangkutan.

Untuk memenuhi kebutuhan komoditas strategis pangan yang kian harinya terus meningkat memerlukan upaya peningkatan hasil pangan dengan memanfaatkan lahan yang terlantar/ tidur, lahan pasang surut dan lahan rawa lebak tetap juga mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Budaya masyarakat Kalimantan yang hidup secara nomaden banyak akibat dari sistem peladangan berpindah timbulnya lahan-lahan yang tidak di kelola dengan benar menjadi lahan tidur. Lahan tidur yang luas dapat dikelola secara kerja sama maupun plasma atau penanaman modal dengan pihak swasta atau korporasi.

Sedangkan yang dipilih adalah tanaman kelapa sawit sebagai upaya restorasi lahan tidur tersebut yang lebih unggul dari pada tanaaman yang lain. Selain itu, lahan yang memiliki tanah bergambut, terbengkalai, dan kurang subur maka sebagai alternative adalah tanaman lidah buaya juga di budidayakan.

Program pemanfatan lahan tidur juga dilakukan diwilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Sebagai pilihan yang lebih ekonomis tanaman sorgum dimanfaatkan untuk lahan kering tersebut. Dalam sekali tanam dengan perawatan yang baik pemupukan maka tanaman sorgum pada umur 55 hari dapat dipetik sebanyak 3 kali. Pengolahan Sorgum menjadi makanan alternative pengganti nasi dan olahan lain sesuai dengan kebutuhan karena banyak mengandung korbhidrat.

Lahan tidur yang terbengkalai menjadi tantangan untuk dimanfaatkan dan dikelola agar dapat memberikan keuntungan dan nilai tambah. Sebagaimana program pemerintah yang lalu dengan satu orang satu pohon untuk mengurangi polusi dan melindungi ekosistem alam.

Untuk mendapatkan hasil peningkatan bahan pangan yang lebih baik perlu ada upaya optimalisasi pemberdayaan lahan tidur dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan diantaranya :

- a. Pemanfaatan sumberdaya lahan potensial tersedia untuk perluasan areal pertanian harus sesuai dengan peruntukannya. Dengan memanfaatkan kebijakan satu peta dan informasi pertanian maka diharapkan tanaman disesuaikan dengan musim tanam dan karakteristik tanaman.
- b. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB). Maka praktek alih fungsi lahan pertanian harus melalui kajian dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Program mempertahankan swasembada pangan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan akan terkendala jika alih fungsi lahan produktif menjadi lahan yang non pertanian. Penguatan kebijakan pemerintah dalam melindungi kelestarian lingkungan hidup dapat menjadi pendorong bagi masyarakat petani mengurangi alih fungsi lahan dan untuk menfaatkan lahan tidur.
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan yang ada melalui peningkatan produktivitas, dan pengembangan inovasi teknologi yang lebih mengutamakan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
- d. Percepatan penelitian dan pengembangan, terutama inventarisasi lahan dikawasan Timur Indonesia dan reevaluasi lahan tersedia dan lahan terlantar yang sudah dilepas.

BAB IV

PENUTUP

16. Umum.

Sebagaimana pembahasan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya dan dalam rangka optimalisasi pemberdayaan lahan tidur untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan sebagai kebutuhan pokok yang semakin meningkat maka secara umum dapat diambil beberapa kesimpulan.

Kondisi tanah Indonesia yang relatif lebih luas dan subur dengan iklim yang baik serta curah hujan yang mendukung merupakan faktor yang menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk bersemangat mengelola lahan tidur lebih optimal guna mendukung peningkatan ketahanan pangan keluarga bahkan daerah secara berkelanjutan.

17. Simpulan.

Saat ini terdapat 34.107.242 Ha lahan yang dalam katagori lahan tidur dan tidak produktif yang berada dikawasan areal penggunaan lain (APL) dan kawasan hutan yang masuk dalam konsensi. 20,1 juta ha lahan pasang surut dan 13,3 juta ha lahan rawa, serta 9,3 juta ha dapat dikembangkan untuk lahan pertanian. Namun masih banyak yang kita lihat adanya lahan terlantar yang tidak dikelola atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar baik itu di kota maupun di pedesaan dan di pedalaman. Kondisi ini tidak sebanding dengan permintaan domestik dengan produksi nasional dan sangat ironi dengan apa yang dilakukan pemerintah yaitu impor bahan pangan seperti beras, jagung, kedelai, bawang putih dan gula dari negara kawasan Asia, Amerika dan Australia.

Dalam pemberdayaan lahan tidur juga mengalami kendala yang dihadapi adalah lokasi yang bukan dalam satu kawasan tetapi terpencar-pencar sehingga membutuhkan waktu dan akses yang tidak mudah serta dana yang memadai. Demikian juga kepemilikan lahan tersebut merupakan

hak tanah Ulayat atau adat yang membutuhkan persetujuan kaum adat untuk mengelola dan memanfaatkannya. Pendekatan yang baik dengan sosialisasi dan memberikan fasilitas dan koordinasi yang intens dengan para pemuka adat untuk memberdayakan lahan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih bagi kaum adat.

Menurunnya kemampuan tanah sebagai sumber daya akibat terjadinya degradasi perlu penanganan yang cepat agar fungsi tanah sebagai media tanam bisa kembali mendapatkan nutrisi dan subur, pemerintah dan swasta/korporasi di bidang pertanian serta tokoh-tokoh masyarakat untuk bekerja sama memberikan edukasi, sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang perilaku hidup yang ramah lingkungan, melakukan reboisasi, membuat teras sering untuk mengembalikan fungsi tanah yang kaya akan unsur hara.

Sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola pertanian, sosial budaya dengan pemikiran yang praktis untuk mudah mendapatkan penghasilan dengan bekerja sebagai buruh yang menerima upah setiap minggu menjadi kelemahan dalam optimalisasi pemberdayaan lahan tidur. Dengan adanya 9,3 juta ha luas lahan tidur yang dapat dikelola menjadi lahan pertanian berpotensi akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Maka komitmen pemerintah yang kuat dengan diterbitkannya regulasi yang menjadi pedoman dan perlindungan kepada masyarakat, dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah berupa kemudahan administrasi tanah dan fasilitas serta partisipasi korporasi dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia melalui pendidikan, latihan, dan aplikasi lapangan serta bimbingan penyuluhan pertanian.

Bumi merupakan bagian dari bentang alam yang memiliki sifat spasial dan merupakan tempat aktivitas manusia. Fenomena permintaan tanah akan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, sedangkan tanah dilihat dari segi ketersediaannya dalam arti luas batas administrasi tanahnya terbatas. Kavling tanah tetap terutama di daerah perkotaan dengan peningkatan nilai ekonomi, oleh karena itu tanah tidak hanya digunakan sebagai objek, tetapi juga sebagai objek stasioner untuk tujuan investasi.

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan tidur salah satunya yang paling sederhana adalah untuk mendapatkan nilai tambah darilahan tersebut. Jika meliputi areal yang luas maka perlunya pengelolaan yang membutuhkan semangat, modal, keterampilan, kemampuan dan sarana pendukung serta teknologi untuk pengelolan menuju industrialisasi pertanian.

Penggunaan lahan yang kompleks di perkotaan berdampak pada fluktuasi harga lahan, dimana kavling dengan fungsi komersial cenderung memiliki harga jual yang tinggi. Perkembangan tata guna lahan mempengaruhi kelengkapan faktor pendukung lainnya seperti struktur dan infrastruktur jalan. Semakin kompleks komponen yang mempengaruhi nilai tanah, maka harga tanah semakin berfluktuasi. Karena lahan tidak dapat ditingkatkan, maka terjadi perubahan penggunaan lahan, yang mengakibatkan sebagian lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian.

Perubahan penggunaan lahan yang berjalan seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya permintaan akan lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam kemajuan dan keberhasilan pertanian, karena ketersediaan lahan berarti petani siap mengolah lahan. Jika tanah tidak diolah, itu tidak akan menguntungkan. Lahan yang tidak digarap ini, juga dikenal sebagai lahan tidur, mempengaruhi hasil panen yang akan menurun, dan juga mempengaruhi pendapatan petani.

18. **Rekomendasi.**

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di dunia tentunya akan semakin bertambah pula konsumsi bahan pangan. Stigma Indonesia adalah negara agraris menjadi insiprasi kembali bagi pemerintah dan masyarakatnya untuk mengantisipasi kebutuhan bahan pangan tersebut. Sehingga perlu adanya pemberdayaan lahan tidur guna mendukung

peningkatan ketahanan pangan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dimasa yang akan datang, maka perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah pusat dan daerah harus senantiasa melakukan pemutakhiran informasi dan melengkapi data potensi sumber kekayaan alam yang terkoneksi dalam program digitalisasi seperti Sistem Informasi Geospasial (SIG) sehingga secara periodik dapat dilakukan update data, dan output data berupa hasil analisis dari berbagai perubahan variabel yang mempengaruhi kondisi wilayah secara akurat mudah diakses dan langsung dapat ditampilkan.
- b. Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah dan swasta perlu mengoptimalkan lahan pertanian melalui metode sosialisasi hasil kajian secara intensif dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha pertanian dan pangan sehingga mampu mengakomodasikan sumberdaya untuk menerapkan kebijakan pertanahan, dan pengembangan sektor pertanian dan pangan di daerah
- c. Pemerintah bersama pelaku usaha dan korporasi memberikan fasilitas pengembangan dan peningkatan usaha pertanian dan pangan baik, pendidikan dan latihan penyuluhan pertanian, saran dan prasarana serta permodalan yang bertujuan untuk mensinergikan sektor pertanian yang lebih berorientasi pada produktifitas dan nilai tambah ekonomis dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan pangan.
- d. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kerja sama secara intensif dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan ekspor impor bahan pangan, dengan institusi lain seperti Polri dalam rangka pengamanan distribusi pupuk dan bibit tanaman, dengan TNI dalam pendampingan program cetak sawah dan tambah tanam, dengan LIPI dan BPPT untuk penerapan teknologi tepat guna bagi pertanian yang

efektif, efisien dan ramah lingkungan, dengan koperasi atau lembaga lain untuk permodalan dan pemasaran hasil panen.

- e. Pemerintah terus menguatkan komitmen untuk membangun sektor pertanian yang moderen menuju ketahanan sampai swasembada pangan, meningkatkan diplomasi bilateral dan internasional tentang produk pertanian dan perkebunan seperti sawit, karet, kakao, tembakau, kopi dan lain-lain agar mendapatkan pasar global dengan harga yang kompetitif sehingga mendorong petani domestik lebih bergairah dalam sektor pertanian.

Jakarta, 20 Agustus 2021

Penulis



Totok Sulistyono, S.H.,M.M
Kolonel Inf Nrp 1910037061268



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang RI nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025.
- Undang-undang RI nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-undang RI nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.
- Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Referensi

- A. Hidayat. 2009. Sumberdaya Lahan Indonesia : Potensi, Permasalahan, dan Strategi Pemanfaatan. *Jurnal Sumberdaya Lahan* Vol 3 no.2. Desember 2009.
- Didit Herdiawan. 2012. Ketahanan Pangan dan Radikalisme. *Republika* 2012.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 157.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2009), Hlm. 23
- Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011). hlm 52
- *Poerwadarminta. 2008. Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. h. 986
- Winardi, (1999). *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung : Mandar Maju. h. 363

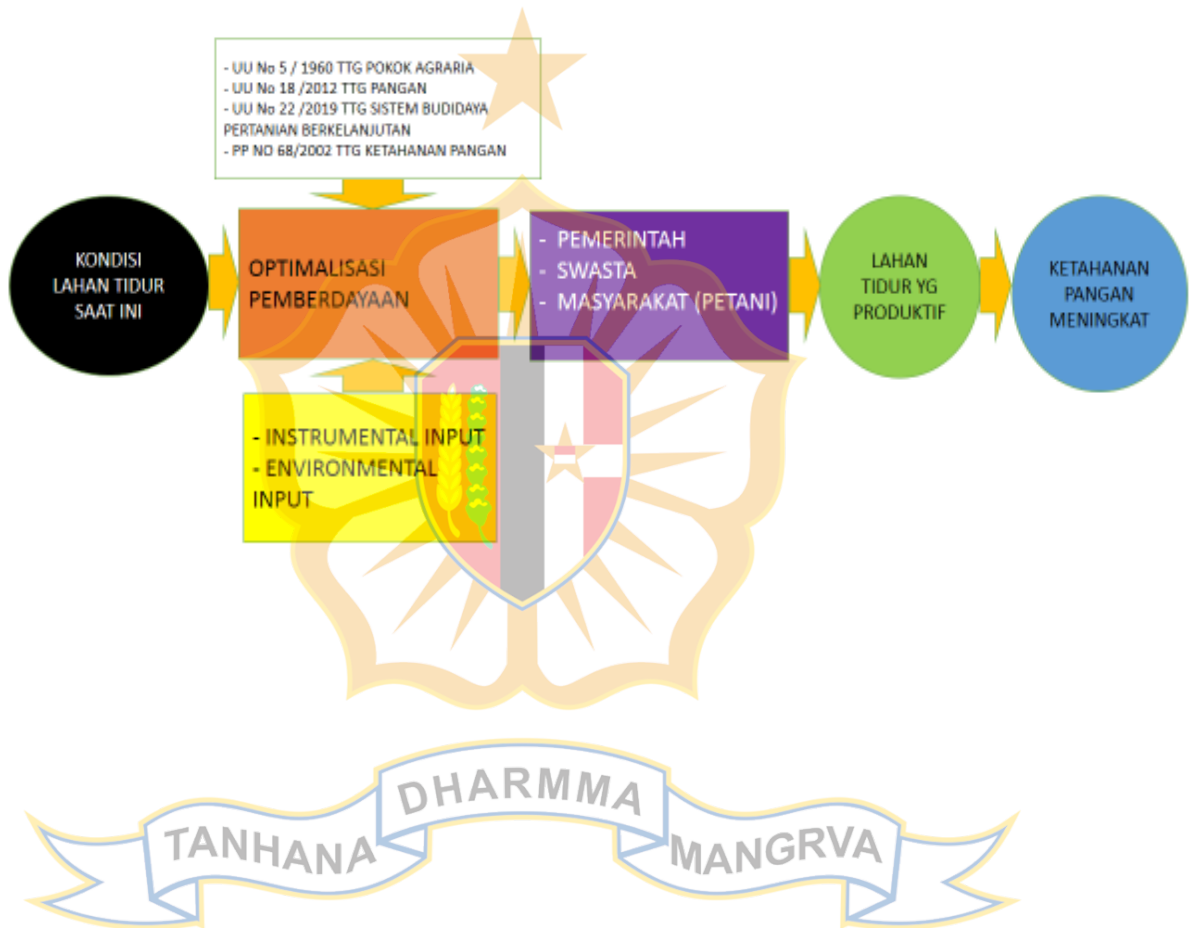
- <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-manfaat-faktor-yang-memengaruhi-dan-contoh-analisis-swot/>, diakses 10 Juli 2021.
- https://www.bps.go.id/indikator/indikator/list_/sdgs_1/



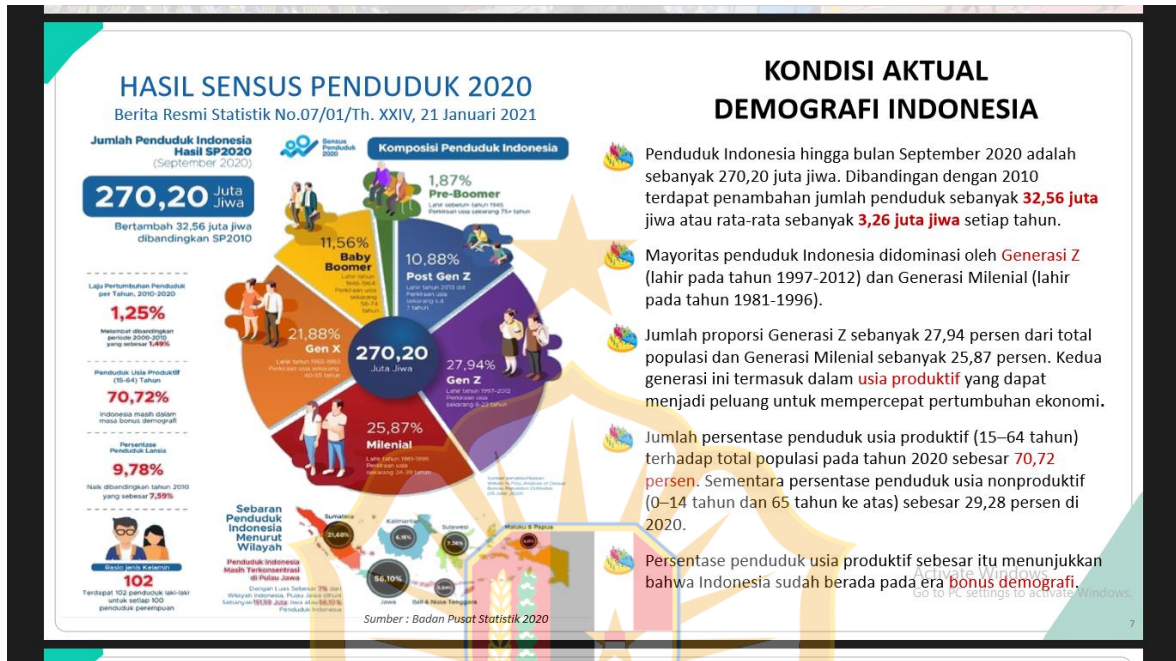
ALUR PIKIR

ALUR PIKIR -2

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN LAHAN TIDUR
UNTUK Mendukung Peningkatan KETAHANAN PANGAN



SENSUS PENDUDUK 2020



KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PANGAN

PERKIRAAN KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PANGAN POKOK NASIONAL

JUNI – AGUSTUS 2020

No.	Komoditas	Perkiraan Ketersediaan				Perkiraan Kebutuhan	Perkiraan Neeraca s.d Agustus	(Ton)
		Stok Akhir Mei'20	Perkiraan Produksi	Rencana Impor	Jumlah			
	1	2	3	4	5 = 2+3+4	6	7 = 5-6	
1	Beras	7.775.886	7.965.923		15.741.809	7.492.056	8.249.753	
2	Jagung	4.327.545	4.807.119		9.134.664	4.599.959	4.534.705	
3	Bawang Merah	240.523	415.146		655.669	354.094	301.575	
4	Bawang Putih *	116.306	14.801	34.858	131.107	146.444	15.337	
5	Cabai Besar		294.758		294.758	273.713	21.045	
6	Cabai Rawit		282.878		282.878	251.998	30.880	
7	Daging Sapi/Kerbau **	62.850	107.798	180.752	170.648	192.110	21.462	
8	Daging Ayam Ras	204.632	992.764		1.197.396	854.604	342.792	
9	Telur Ayam Ras	24.906	1.268.117		1.293.023	1.203.041	89.982	
10	Gula Pasir	563.521	1.595.571		2.159.092	691.436	1.467.656	
11	Minyak Goreng	12.861.142	8.412.132		21.273.274	2.299.897	18.973.377	

Sumber: Biro Perencanaan (Bahan Ratas 30 Maret' 20)



DATA LUAS DAN PENYEBARAN LAHAN KRITIS MENURUT PROVINSI

PROVINSI	LUAS DAN PENYEBARAN LAHAN KRITIS (HA)		
	2011	2013	2018
ACEH	744954	625358	316637
SUMATERA UTARA	1135341	1059467	1338810
SUMATERA BARAT	509977	630695	651970
RIAU	840658	1889622	710873
JAMBI	1420602	779774	213985
SUMATERA SELATAN	3886062	312864	733756
BENGKULU	642587	721674	148887
LAMPUNG	589229	322924	403910
KEP. BANGKA BELITUNG	114836	216108	20687
KEP. RIAU	254749	338208	8230
DKI JAKARTA	-	-	-
JAWA BARAT	483944	342966	911192
JAWA TENGAH	159853	110843	375733
DI YOGYAKARTA	33559	26117	79123
JAWA TIMUR	608913	1221919	432225
BANTEN	67503	36955	330407
BALI	48052	45997	46895
NUSA TENGGARA BARAT	91859	177577	65799
NUSA TENGGARA TIMUR	1041688	960854	840914
KALIMANTAN BARAT	3169491	859575	1015631
KALIMANTAN TENGAH	4636890	5144704	861240
KALIMANTAN SELATAN	786911	641586	511594
KALIMANTAN TIMUR	318836	910820	275272
KALIMANTAN UTARA	274340	274340	199734
SULAWESI UTARA	276056	269211	289782
SULAWESI TENGAH	317769	452232	264874
SULAWESI SELATAN	920452	532661	449606
SULAWESI TENGGARA	885463	945105	424655
GORONTALO	257176	566637	332298
SULAWESI BARAT	113960	319153	88421
MALUKU	762324	728776	299607
MALUKU UTARA	611106	420101	387889
PAPUA BARAT	487343	179241	437288
PAPUA	1076699	2239229	538523
INDONESIA	27.294.842	24.303.294	14.006.450

Sumber data BPS Pertanian 2018 (diolah)

DAFTAR GAMBAR



LAHAN TIDUR AKIBAT LADANG BERPINDAH-PINDAH



LEBAK YANG TIDAK DIKELOLA LAGI



LAHAN PRODUKTIF YANG TIDAK DIKELOLA LAGI



SEBAGIAN DARI ALIH FUNGSI



Ilustrasi lahan tidur untuk pertanian. foto : MI/Ramdani.

PENGELOLAAN LAHAN



MENGOPTIMALKAN MESIN TRAKTOR



PENYULUH PERTANIAN



MENYEMPROT HAMA

HASIL PANEN LAHAN TIDUR



CETAK SAWAH DARI LAHAN TIDUR



Syahrul saat panen bawang merah bersama Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri di areal seluas 45 hektar di Desa Risa, Kecamatan Wohu, Kamis (28/5/2020)

PANEN BAWANG MERAH



KERJASAMA PEMERINTAH DAN SEMUA UNSUR MASYARAKAT

Editor **Nurfahmi Budi Prasetyo**



Presiden Jokowi berdialog dengan petani - Foto: Setkab.go.id

KOMITMEN PEMERINTAH

DATA RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Totok Sulistyono, S.H.,M.M
2. Pangkat/Nrp : Kolonel Inf Nrp 1910037061268
3. Tempat/tgl Lahir : Semarang, 29 Desember 1968
4. Agama : Islam
5. Alamat : Perum Amaya Residence A-15 Jln. Sukaati, Pasirluyu
Regol Bandung
6. Pendidikan Militer
 - a. Akmil Thn 1991
 - b. Sesarcab Inf Thn 1992
 - c. Selapa IF Thn 2000
 - d. Seskoad XLIV Thn 2006
7. Pendidikan Umum
 - a. SD Sronдол I Semarang Thn 1981
 - b. SMP Negeri 21 Semarang Thn 1984
 - c. SMA Negeri 4 Semarang Thn 1987
 - d. S1 Univ Tri Tunggal Surabaya Thn 2012
 - e. S2 STIE Indonesia Malang Thn 2013
8. Riwayat Jabatan
 - a. Danton- Kasi 2/ops- Dankipan B Yonif 145/BL Dam II/Swj Thn 1997
 - b. Pasi-4/log Yonif 141/AYJP Dam II/Swj Thn 1999

- c. Kasipamops Mensis Secapaad Thn 2000
- d. Kasiter Korem 032/Wbr Dam I/BB Thn 2006
- e. Danyonif 125/SMB Brigif 7/RR Dam I/BB Thn 2009
- f. Dandodiklatpur Rindam I/BB 2011
- g. Dandim 0827/Sumenep Rem 084/BJ Dam V/Brw Thn 2012
- h. Waasrendam Jaya Thn 2016
- i. Asrendam XVI/Patimura Thn 2017
- j. Patun - Kabidrendik Seskoad Thn 2020
- k. Pamen Denma Mabasad - sekarang

9. Pengalaman Tugas

- a. GOM IX Irian Jaya Thn 1993
- b. Satgas Pam Pasir Timah P. Bangka-Belitung Thn 1997
- c. Satgas Pam Rahwan Maluku Thn 2010

10. Keluarga :

- a. Istri : Dewi Adriani, S.E. Thn 1971
- b. Anak-anak :

- 1) Sankise Valensia S.P., S.Ked Thn 1996, Koas
- 2) Nabila Milenia Melati S.P Thn 2000, UPI
- 3) M. Andeto SP Thn 2012, SD Assalaam